

# DAMPAK PERUBAHAN POLA KONSUMSI PANGAN NON BERAS (Sagu Dan Umbian) KE PANGAN BERAS TERHADAP KETAHANAN PANGAN LOKAL MASYARAKAT DI DESA HATUSUA, KEC. KAIRATU KAB. SBB

S . F . W . T H E N U  
Dosen Fakultas Pertanian Universitas Pattimura

## ABSTRAK

Ketahanan pangan dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketersediaan pangan yang cukup bagi semua orang pada setiap saat dan setiap individu mempunyai akses untuk memperolehnya, baik secara fisik maupun ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana dampak perubahan pola konsumsi terhadap ketahanan pangan lokal masyarakat di desa Hatusua. Menggunakan metode survei menggunakan analisis Deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan dampak sebagai berikut : (1) berkurang/menipisnya pengetahuan masyarakat (terutama generasi muda) terhadap nilai-nilai sasi yang ditunjukkan oleh : menurunnya minat masyarakat menggunakan budaya sasi untuk melindungi sumberdaya alam mereka. Keadaan ini tentunya ikut dipicu oleh beberapa faktor lain seperti : perkembangan penduduk , pendidikan dan perkembangan agama, serta sosialisasi pemahaman sasi yang rendah kepada masyarakat, (2) perubahan sistem bagi hasil (maanu), (3) perubahan teknologi pengolahan, (4) perubahan status kepemilikan tanah, (5) perubahan pola pikir aparat desa dan warga masyarakat.

**Kata Kunci :** Ketahanan pangan lokal, Pola konsumsi pangan.

## PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat asasi dan esensial, yang bila tidak dipenuhi akan menyebabkan kelaparan dan bila terus berlanjut akan menyebabkan kematian. Oleh karena itu manusia selalu berusaha untuk menghasilkan bahan pangan kebutuhannya guna menjamin ketahanan pangan bagi individu, rumah tangga bahkan pada kelompok yang lebih besar, misalnya masyarakat di suatu negara.

Ketahanan pangan dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketersediaan pangan yang cukup bagi semua orang pada setiap saat dan setiap individu mempunyai akses untuk memperolehnya, baik secara fisik maupun ekonomi. Ketahanan pangan dapat juga diartikan sebagai suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Salah satu aspek perwujudan ketahanan pangan adalah penyediaan pangan yang cukup melalui produksi bahan pangan yang swasembada (Effendi 1996).

Salah satu program pemerintah yang diarahkan untuk memelihara kemampuan swasembada pangan dan memperbaiki keadaan gizi melalui penganekaragaman jenis pangan, baik yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan adalah Program Diversifikasi Pangan melalui Inpres Nomor 20 tahun 1979, diikuti dengan Kepres No. 004/DATRANS/1980 tentang penelitian pemanfaatan dan pendayagunaan sagu sebagai bahan pangan dan energi. Sasaran Program Diversifikasi Pangan ini adalah (a) meningkatkan penyediaan pangan untuk mencukupi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral; (b) terwujudnya pola penganekaragaman pangan yang memperhatikan nilai gizi, nilai budaya dan daya beli masyarakat, (c) terkoordinasinya ketahanan pangan, keamanan pangan dan penyediaan pangan. Selanjutnya ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan. Sesuai dengan arahan GBHN 1999-2004, ketahanan pangan yang ingin diwujudkan adalah yang bertumpu pada keragaman sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Hasil penelitian Louhenapessy, (1994), menyatakan bahwa sampai dengan akhir tahun enam puluhan sagu dan umbian masih merupakan bahan pangan pokok bagi penduduk kota Ambon dan sekitarnya (termasuk Pulau Seram). Namun belakangan ini secara internal, terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat dari pangan non beras (sagu dan umbian) ke beras. Masyarakat menjadi kurang berminat untuk mengusahakan sagu, sehingga banyak dusun sagu dilerantarkan (tidak di olah). Salah satu penyebab utama perubahan ini adalah : *intervensi pemerintah yang amat dalam, baik dalam produksi maupun distribusi beras*, maka beras kemudian menjadi satu-satunya pangan pokok yang mempunyai citra (image) yang superior dan komoditas politik, yang bila tidak dipenuhi dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas nasional (Thenu, 2004)

Perlahan tapi pasti secara sistematis intervensi pemerintah telah ikut memberikan dampak yang luas tidak hanya pada perubahan konsumsi masyarakat, tetapi juga terjadinya perubahan fundamental pada sistem kelembagaan masyarakat secara lokal dalam pengelolaan SDA sagu yaitu : (1) *perubahan atau pergeseran kebiasaan mengkonsumsi sagu pada masyarakat*, (2) *melemahnya sistem aturan pengelolaan lokal SDA sagu (penduduk asli) di Maluku*. Thenu, (2006). Melemahnya berbagai kelembagaan lokal (*rule of the games*) terindikasi dalam beberapa bentuk perubahan kelembagaan (*institution change*) yakni : *perubahan teknologi tradisional (nani) ke teknologi semi mekanis (mesin parut)*, *sistem bagi hasil*, *sistem sasi*, *sistem pengolahan sagu*, *sistem pemerintahan desa dan perubahan perilaku masyarakat*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana dampak perubahan pola konsumsi pada kelembagaan pengelolaan sagu terhadap ketahanan pangan lokal masyarakat Desa Hatusua. Menggunakan metode *survei* dengan pendekatan analisis *Kualitatif Diskriptif*.

## PERUBAHAN POLA KONSUMSI MASYARAKAT

Pola Konsumsi suatu masyarakat dapat diketahui dari tingkat konsumsi, pengeluaran rumah tangga, serta pangsa dari pengeluaran rumah tangga untuk suatu komoditas tertentu. Hasil penelitian Secara umum tipologi pola konsumsi makanan pokok masyarakat di Desa Hatusua adalah sebagai berikut : *beras + sagu + umbian*, namun demikian secara spesifik formulasi ini dapat berubah sesuai kondisi ekonomi masyarakat sehari-hari, yakni : *beras + sagu atau beras + umbian atau sagu + umbian* Secara deskripsi akan dijelaskan pangsa pengeluaran rumah tangga di desa Hatusua pada Tabel 1 dan 2 berikut ini.

Tabel 1. Persentasi Pangsa Pengeluaran Rata-Rata Konsumsi Rumahtangga/Tahun

Uraian	Pengeluaran Jenis Pangan			Pendapatan	Persentasi				
	Sagu	Beras	Umbian		Sg	Brs	Um	PL	NP
Total	16.830.000	81.684.000	25.650.000	448.030.000	3,76	18,23	5,73	24,19	48,19
Rataan	420.750	2.042.100	641.250	11.200.750					

Keterangan : *Pangan lain (PL), Non pangan (NP)*

Dari Hasil analisis data pada Tabel 1 diperoleh pangsa pengeluaran rata-rata pangan sagu dan pangan non sagu terhadap total pendapatan rumahtangga sebesar 27,72% dengan rincian pangan sagu sebesar 0,0376 dan pangan non sagu (beras dan umbian) masing-masing sebesar 0,1823 dan 0,0573. Ini menunjukkan bahwa rata-rata rumahtangga mempergunakan 3,76% dari total pengeluaran konsumsinya untuk pangan sagu dan pangan non sagu 18,23% (beras), 5,73% (umbian). Dengan kata lain beras mendapatkan porsi lebih besar dari total pengeluaran konsumsi rumahtangga masyarakat. Hal ini disebabkan karena rumahtangga contoh yang diambil memiliki rata-rata pengeluaran untuk konsumsi pangan pokok perbulan kurang dari Rp.300.000., sehingga sebagian besar pengeluarannya di gunakan untuk konsumsi pangan terutama beras. Sejalan dengan teori ekonomi semakin kecil pendapatan rumah tangga maka proporsi pengeluaran untuk konsumsi pangan semakin besar bila dibandingkan dengan konsumsi non pangan.

Dari total pengeluaran terhadap ketiga jenis pangan pokok ini, beras mendominasi pengeluaran sebesar 65,79% selanjutnya umbian 20,66% dan sagu 13,55%. Berikut ini rincian pengeluaran ketiga jenis pangan tersebut pada Tabel 2.

Tabel 2. Persentasi Pengeluaran Terhadap Pangan Sagu, Beras dan Umbian

Jenis Pangan	Total (Rp)	Rataan (Rp)	Persentasi (%)
Sagu	16.830.000	420.750	13,55
Beras	81.684.000	2.042.100	65,79
Umbian	25.650.000	641.250	20,66
<b>Jumlah</b>	124.164.000	3.104.100	100

Selanjutnya besar persentasi pengeluaran rumahtangga untuk kebutuhan pangan pada umumnya sebesar 0,5191 dengan perincian (sagu, beras, umbian 27,72%) dan (pangan lainnya 24,19%). Ini menggambarkan bahwa 51,91% dari pendapatan rumahtangga dipakai untuk memenuhi kebutuhan pangan sedangkan 48,09% untuk kebutuhan non pangan. Dengan demikian maka sebagian pendapatan rumahtangga masih digunakan untuk pemenuhan pangan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia.

### Dampak dari perubahan pola konsumsi

Disadari atau tidak oleh masyarakat, perubahan pola konsumsi ikut memberikan dampak bagi kelembagaan pengelolaan SDA sagu di desa Hatusua. Ditemukan berbagai permasalahan mendasar tentang *nilai-nilai kelembagaan lokal* yang melemah sehingga secara spesifik memberikan dampak bagi ketahanan pangan lokal masyarakat. Komponen nilai kelembagaan lokal tersebut meliputi 4 aspek yaitu : (1) konservasi dan perlindungan sumberdaya alam, (2) produktivitas dan kualitas produk sagu, (3) status kepemilikan (*property right*) (4) sumberdaya manusia (*aparatur desa*) dan warga masyarakat.

## KONSERVASI DAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA ALAM

### Sistem Sasi

Sasi adalah pranata sosial yang mengandung kelenturan yang mengatur tentang larangan untuk mengambil dan kebolehan warga masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu (Anonymous, 1996).

Adapun *tujuan dari sasi* adalah :

- Menjaga ketertiban dalam pengelolaan alam dan lingkungan hidup,
- Mengubah pola pikir dan tingkahlaku masyarakat menjadi masyarakat berwawasan lingkungan,
- Mencegah perusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup,
- Penggunaan hak seseorang secara tepat, menurut waktu yang ditentukan untuk memetik hasil kebunnya,
- Mengurangi kemungkinan timbulnya pencurian.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa semakin berkurang/menipisnya pengetahuan masyarakat (*terutama generasi muda*) terhadap nilai-nilai *sasi* lebih disebabkan oleh : desakan kebutuhan ekonomi (kebutuhan hidup), pemahaman dan sosialisasi nilai-nilai *sasi* yang tidak berkelanjutan dari generasi kegenerasi serta dampak Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa, maka orang semakin tidak memahami, menghargai dan melaksanakan nilai-nilai *sasi* tersebut. Hal tersebut didukung oleh beberapa hasil penelitian sebelumnya yaitu :

Hasil penelitian *Kaihena (1988) dalam A.E. Pattiselano: sasi* sebagai suatu adat semakin terdesak, sehingga ketakutan dan ketaatan masyarakat terhadap roh-roh leluhur melalui agama suku semakin berkurang, karena berkembang agama dan pendidikan, serta didukung dengan berkembangnya kebutuhan.

Hasil penelitian *Unepetty (1995) dalam A.E. Pattiselano* menyimpulkan bahwa *sasi* yang dilaksanakan pada berbagai kawasan di Maluku Tengah terdapat perbedaan pada jenis tanaman dan hasil laut, juga dalam pelaksanaan untuk memenuhi kebutuhan ekologis (pelestarian) dan kebutuhan ekonomis. Pemenuhan kebutuhan ekonomis makin meningkat, maka kebutuhan ekologis semakin tidak diperhatikan.

Hasil penelitian *Sitanala (1997) dalam A.E. Pattiselano* menyimpulkan bahwa *sasi* masih dilaksanakan pada beberapa desa di kawasan Maluku Tengah (termasuk Desa Hatusua), tetapi pada beberapa desa lainnya sudah mulai berkurang bahkan tidak dilaksanakan lagi, sehingga dengan masuknya agama, maka upacara-upacara *sasi* dimulai dan diakhiri melalui doa di rumah ibadah.

Secara umum berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa *sasi* masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat sebagai warisan budaya, walaupun ada juga yang tidak melaksanakannya. Keadaan tersebut terjadi seiring dengan *perkembangan penduduk, pendidikan dan berkembangnya agama, pemahaman dan sosialisasi yang rendah dan dampak Undang-Undang No. 5 tahun 1979*, maka pelaksanaan *sasi* semakin terdesak dan cenderung tidak dilaksanakan lagi. Untuk mempertahankan kelestarian SDA sagu dan lingkungan, maka diperlukan penguatan nilai-nilai *sasi* kepada masyarakat, oleh karena itu peranan pemerintah dan setiap stakeholders yang berkepentingan dengan SDA sagu dan lingkungannya sangatlah dibutuhkan demi keberlanjutannya untuk generasi mendatang.

### **Sistem bagi hasil (maanu)**

Terjadi perubahan kelembagaan sistem bagi hasil dari teknologi tradisional (*nani*) ke mesin parut (semi mekanis), dimana ada balas jasa terhadap alat yang digunakan (*mesin parut*) sedangkan pada alat tradisional tidak ada balas jasa. Pohon sagu semakin dikomersilkan, karena memberikan nilai tambah bagi pemilik dusun, juga kepada pengolah (*pemilik mesin parut*). Namun dari aspek sosial budaya terjadi pengikisan nilai-nilai budaya lokal, karena orang semakin berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*), sedangkan aspek sosial dan kekeluargaan makin menipis. Pengolah sagu cenderung mengejar target produksi, tanpa memperhatikan kondisi lingkungan hutan sagu. Dampaknya aspek pelestarian lingkungan kurang diperhatikan, sehingga terjadi kerusakan pada lingkungan dan sumberdaya alam sagu.

### **Sistem pengolahan dan teknologi**

Sistem pengolahan sagu masih tergolong sederhana, karena jenis peralatan (*teknologi*) yang digunakan adalah berupa alat tokok tradisional (*nani*) dan mesin parut. Peralatan pendukung yang digunakan untuk setiap jenis alatpun tidak jauh berbeda. Penggunaan mesin parut turut menyumbang pada produktivitas hasil sagu. Namun peningkatan produktivitas ini diikuti dengan sikap yang konsumtif dan cenderung eksploitatif pada SDA sagu. Hasil penjualan sagu digunakan untuk membeli beras (penyediaan stok beras), sedangkan dusun sagu kurang diperhatikan, sehingga banyak pohon sagu kering dan tidak termanfaatkan (bagian dusun/hutan yang sulit dijangkau). Produksi sagu setempat bermuara ke pasar kecamatan bahkan antar pulau. Untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat membeli dari pasar atau desa-desa sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa sagu bukan lagi merupakan sumber pangan utama masyarakat, tetapi sebagai pangan komplementer.

## **STATUS KEPEMILIKAN (*PROPERTY RIGHT*)**

### **Kepemilikan Dusun**

Seluruh lahan/tanah dusun di Desa Hatusua memiliki status kepemilikan yang jelas, sehingga sangat mudah dalam pemanfaatannya bagi pemilik maupun masyarakat. Secara umum kepemilikan dusun di masyarakat sebagai berikut :

1. *Dusun Pribadi*. Areal tanah yang hak pemilikannya dipegang oleh seseorang (*individu*) yang diperoleh melalui pemberian orang tua (pembagian hak anak) atau melalui pembelian.
2. *Dusun Keluarga*. Areal tanah yang hak pemilikannya dipegang oleh keluarga atau perorangan yang hak pemanfaatannya diatur sendiri oleh keluarga atau pemilik.

3. *Dusun Dati* . Merupakan milik keluarga besar (marga atau clan) yang pemanfaatannya diatur bersama oleh anggota clan.
4. *Dusun Negeri* . Merupakan milik negeri yang pemanfaatannya diatur oleh kepala desa atau rapat saniri negeri

Kepemilikan dusun di desa sangat jelas, sehingga semua pihak mudah untuk mengakses pada setiap pemilik. Namun demikian fakta membuktikan bahwa dengan berubahnya pola konsumsi masyarakat, maka berubah pula prioritas sumber pangan (sagu umbian berubah ke beras). Karena sikap masyarakat terhadap keutamaan pangan lokal telah berubah, maka sagu kemudian menjadi pangan komplementer dan dusun-dusun sagu menjadi tidak utama. Dampak yang dirasakan langsung yakni : dusun sagu di terlantarkan, dikonversi menjadi lahan sawah dan pemukiman atau kebutuhan pembangunan lainnya, bahkan jual. Berdasarkan keterangan warga masyarakat, terdapat ± 23 hektar tanah dan dusun desa yang dijual kepada transmigran dijadikan sawah, belum termasuk tanah-tanah pribadi milik masyarakat dijual ataupun dikontrakan dengan sistem bagi hasil.

Secara eksternal pemberlakuan UU No 5 tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa. Penerapan Undang-Undang ini ternyata berimplikasi pada berbagai aset desa (tanah, dusun/kebun) dijual dan dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab. Hal ini disebabkan karena pemerintah desa kurang memahami tatanan kelembagaan kepemilikan tanah/dusun di desa. Faktor lainnya yang tidak kalah penting pengaruhnya pada masa lalu adalah penerapan program Transmigrasi Nasional yang bersifat top-down, merambah ke seluruh hierarki pemerintahan yang harus mendukung program tersebut. Dampaknya adalah tanah-tanah desa dan dusun/kebun sagu diserahkan kepada pemerintah dengan ganti rugi kurang memadai. Masyarakat terlalu lugu, dilain pihak pemerintah cenderung mendikte dalam mensukseskan program nasional, sehingga kehilangan kearifan untuk melihat keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan milik masyarakat adat.

## SUMBERDAYA MANUSIA (*APARATUR DESA*) DAN WARGA MASYARAKAT

### **Aparatur desa**

Setelah diberlakukan Undang-Undang No.5 tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa. Undang-Undang ini memberikan ruang bagi setiap warga negara berhak untuk dipilih menjadi kepala desa/raja. Pada hal dalam sistem pemerintahan adat, tidak semua orang bisa memenuhi syarat tersebut. Hanya orang-orang dari marga tertentu dari keturunan pemimpin (parentah) saja yang menduduki jabatan tersebut. Maka Desa Hatusua dan desa-desa adat lainnya, yang memiliki ciri dan karakteristik tersendiri dalam pelaksanaan pemerintahan adatnya menjadi berubah. Jabatan (*Raja, Orang kaya, Skebe, Upulatu, Pati*) yang berlaku dan dikenal di Maluku di ganti menjadi kepala desa.

Ternyata realisasi dari undang-undang tersebut menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap sistem pemerintahan desa-desa adat : antara lain istilah kampung/negeri berubah menjadi desa, dan yang menjadi kepala desa adalah siapa saja dari setiap marga atau warga desa memiliki peluang menjadi kepala desa, bahkan ada desa adat yang di pimpin oleh orang luar (bukan orang asli) yang tidak mengerti persis kondisi sosial budaya dan adat istiadat di desa. Dampak dari perubahan ini, maka timbul kecenderungan image masyarakat bahwa jabatan kepala desa merupakan suatu jabatan politik dan bisnis kotor, yang bisa diperebutkan oleh siapa saja, alhasil orang berebutan lalu mengorbankan apa saja termasuk nyawa manusia untuk memperoleh jabatan tersebut.

Setiap kepemimpinan kepala desa cenderung eksploitatif demi meraup keuntungan pribadi dan kelompok, kepentingan masyarakat umum terabaikan, masa jabatan dilihat sebagai masa mengeruk sebanyak-banyaknya keuntungan. Tanah-tanah desa dijual (termasuk dusun sagu), dengan kedok sebagai sumber dana pembangunan desa, subsidi desa disalahgunakan, akhirnya desa menjadi tertinggal dan miskin. Dampak lainnya yang ditimbulkan adalah Masyarakat kurang menghargai aparat desa (pemimpin), karena pemimpin kehilangan wibawa, sehingga banyak program-program pemerintah yang membutuhkan

partisipasi masyarakat menjadi mandek dan cenderung gagal. Masyarakat lebih menghargai lembaga keagamaan dari pada lembaga desa, terjadi blok dalam masyarakat, sikap pro dan kontra semakin tajam dan tidak pada proporsinya.

### **Perubahan pola pikir masyarakat**

Muncul paradigma baru di masyarakat menganggap, beras sebagai pangan utama (pokok), sehingga beras menjadi ukuran kesejahteraan bagi mereka. Dari total pengeluaran masyarakat terhadap pangan, maka 65,79 % di alokasikan untuk beras dan sisanya untuk pangan lainnya. Petani pengolah sagu memperoleh pendapatan dari sagu, tetapi digunakan lagi untuk membeli beras persediaan (stok) buat konsumsi rumahtangga. Nampak bahwa dusun sagu dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan mereka, tapi dusun sagu sendiri kurang diperhatikan.

Dusun sagu sebagai aset alami yang mesti dikelola masyarakat secara optimal, belum sepenuhnya dimanfaatkan. Karena kondisi medan/lahan dusun sagu cukup sulit di jangkau, sehingga pengelolaannya tidak intensif. Peran sebagai penduduk asli pengguna utama sagu menjadi berubah seiring waktu. Karena secara perlahan tapi pasti peran ini telah diisi oleh penduduk pendatang (transmigran). Mereka mengontrak dusun atau membeli pohon, daun dan dahan (gaba-gaba) dan diolah menjadi (sagu mentah, atap rumah dan bahan bangunan). Pola seperti ini telah berlangsung lama, namun masyarakat sendiri bersifat masabodoh. Alhasil banyak dusun-dusun sagu menjadi rusak, karena pengelolaan oleh para penggunanya cenderung eksploitatif dan tidak bertanggung jawab. Perubahan sikap dan perilaku masyarakat seperti ini menggambarkan sebuah perubahan pola pikir yang tidak berorientasi pada masa depan.

### **Ketahanan Pangan**

Pangsa pengeluaran rumahtangga terhadap beras lebih besar dibandingkan sagu dan umbian. Ini terbukti dari besarnya alokasi pendapatan yang dikeluarkan untuk membeli beras sebesar Rp.81.684.000/thn sedangkan sagu dan umbian masing-masing Rp.16.830.000, Rp.25.650.000/thn, menunjukkan bahwa pengeluaran rumahtangga untuk pangan beras melebihi pangan sagu dan umbian. Masyarakat memilih mengkonsumsi beras karena beberapa pertimbangan : *bergatra ekonomi* yaitu disamping kemudahan mendapatkan beras, juga karena subsidi pemerintah terhadap harga beras menyebabkan tepung sagu sulit bersaing dengan beras, (2) *produksi sagu rendah* akibat kurangnya investasi serta tidak didukung oleh kebijakan pemerintah (3) *terbatasnya diversifikasi produk sagu* menyebabkan daya saing sagu rendah.

Beras terdapat dimana-mana dalam jumlah yang memadai dan harga yang terjangkau, memberikan kemudahan bagi masyarakat. Sehingga pada setiap rumahtangga penduduk, tersedia stok beras bulanan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Sagu dan umbian menjadi pelengkap/ komplementer. Fenomena perubahan pola konsumsi ini bukan saja terjadi di desa Hatusua, namun juga terjadi desa-desa tetangga lainnya. Bahkan fenomena yang sama terjadi pula di desa-desa pinggiran di Kecamatan Tanimbar Selatan, terutama pada generasi yang lahir di era tahun delapan puluhan. Kebiasaan mengkonsumsi pangan umbian mengalami pergeseran ke pangan beras.

Terjadinya perubahan pola konsumsi ini, ikut mengubah struktur kelembagaan stok pangan di masyarakat (utamanya desa pinggiran/hinterland). Pangan lokal (sagu dan umbian, pisang dll) bukan merupakan stok utama masyarakat, tetapi telah diganti oleh beras. Secara spesifik kondisi ini sangat tidak menunjang fondasi ketahanan pangan lokal di masyarakat. Masyarakat mengalami ketergantungan terhadap pihak luar dan dalam jangka panjang mematikan pangan lokal.

## **KESIMPULAN**

- (1) Berkurang/menipisnya pengetahuan masyarakat (*terutama generasi muda*) terhadap nilai-nilai *sasi* yang ditunjukkan oleh : menurunnya minat masyarakat menggunakan budaya *sasi* untuk melindungi sumberdaya alam (sagu). Keadaan ini tentunya ikut dipicu oleh beberapa faktor lain seperti;

*perkembangan penduduk, pendidikan dan perkembangan agama, serta sosialisasi pemahaman sasi yang rendah kepada masyarakat.*

- (2) Perubahan kelembagaan bagi hasil (*maanu*) dari teknologi tradisional (*nani*) ke teknologi *semi mekanis* (mesin parut), dalam bentuk balas jasa yang hanya diberikan pada mesin parut dan tidak pada *nani*. Dari aspek sosial budaya perubahan ini berdampak terjadinya pengikisan nilai-nilai budaya lokal, karena orang semakin berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*), sehingga aspek pelestarian lingkungan diabaikan.
- (3) Perubahan teknologi pengolahan, dari *nani* ke mesin parut turut menyumbang pada produktivitas hasil sagu. Namun peningkatan produktivitas ini diikuti dengan sikap yang konsumtif dan cenderung eksploitatif pada SDA sagu
- (4) Perubahan status kepemilikan tanah/dusun, disebabkan oleh berubahnya pola konsumsi masyarakat dari pangan (sagu dan umbian ke beras) yang menempatkan pangan lokal menjadi pangan komplementer. Dusun sagu menjadi tidak utama, di terlantarkan, dikonversi menjadi lahan sawah, pemukiman, kebutuhan pembangunan lainnya dan jual.
- (5) Kepemimpinan aparatur desa cenderung eksploitatif dan kurang berorientasi ke masa depan. Pola pikir masyarakat sempit, masabodoh dan bersifat konsumtif.

### SARAN

Pemerintah harus lebih serius menyikapi persoalan pangan dan pemanfaatan sumber pangan lokal, melalui pelaksanaan secara konkrit Inpres No. 20 Tahun 1979 tentang Program Diversifikasi Pangan.

Penguatan kapasitas kelembagaan lokal merupakan solusi terhadap menipisnya penghayatan nilai-nilai lokal dimasyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, S. 1996. *Pelestarian dan Pengembangan Sumberdaya Air Sebagai Sarana Kehidupan Dalam Peradaban Manusia, Guna Memelihara dan Meningkatkan Ketahanan Nasional*. pp 7-16 Dalam Mochamad, H.B. Djoeфри. Prosiding Seminar Nasional Gerakan Hemat Air, Jakarta II juli 1996
- Louhenapessy, J. E., 1994. *Evaluasi dan Klasifikasi Kesesuaian Lahan Bagi Sagu (Metroxylon spp.)* Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Pattiselano A. E. 2000. *Analisis sikap dan Perilaku Terhadap Sasi Pada Masyarakat Pulau Saparua Kabupaten Maluku Tengah. UNSTRAT*.
- Thenu, S F.W. 2004. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat dari Komoditi Non Beras (Sagu dan Umbian) ke Beras di Desa Hatusua Kecamatan Kairatu Seram Bagian Barat*. Jurnal Pertanian Kepulauan Vol.3. No.I. April 2004
- Thenu, S.F.W. 2006. *Kajian Kelembagan Lokal Pengelolaan Sagu di Desa Hatusua Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat*. Jurnal Pertanian Kepulauan Vol.2. Oktober 2006